

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PENGGUNAAN SISKEUDES TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Sella Mahcica Tiarno¹; Gideon Setyo Budiwitjaksono²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya^{1,2}

Email : sellmahcica@gmail.com¹; gideon.ak.upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Populasi yang diterapkan ialah aparatur desa yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa (DD) dari 15 desa dengan jumlah 60 aparatur desa. Sampel ditentukan dengan rumus slovin serta pengambilan sampelnya menggunakan teknik *simple random sampling*. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada responden sebagai pengumpulan datanya. Analisis dan uji hipotesis menggunakan PLS dengan hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM dan SPIP tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan penggunaan siskeudes mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD). Hal ini menunjukkan jika penggunaan siskeudes dilaksanakan secara optimal maka perwujudan pengelolaan keuangan atau dana desa dapat semakin akuntabel.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Kompetensi; SPIP; Sistem Keuangan Desa

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine how the influence of HR competence, the government's internal control system (SPIP), and the use of siskeudes on the accountability of managing village funds in Kademangan District, Blitar Regency. The population applied is village apparatus directly related to village fund management (DD) from 15 villages with a total of 60 village apparatus. The sample is determined by the slovin formula and the sample is taken using simple random sampling technique. This study uses a quantitative method by distributing questionnaires to respondents as data collection. Analysis and hypothesis testing using PLS with the results of the study showing HR and SPIP competencies did not affect village fund management accountability and the use of siskeudes affected village fund management accountability (DD). This shows that if the use of siskeudes is carried out optimally, the realization of village financial or fund management can be more accountable.

Keywords : Accountability; Competence, SPIP; Village Financial System

PENDAHUHULUAN

Desa memiliki kesempatan yang besar dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan tata pemerintahan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Eprilsa & Budiwitjaksono (2022), Desa oleh pemerintah diberi otoritas untuk mengatur dan mengalokasikan penggunaan dana desa yang diberikan

secara langsung untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dalam mengelola keuangan atau dana desa (DD) pemerintah desa wajib melaksanakan dengan tertib dan berlandaskan asas transparan, partisipasi, dan akuntabel (Martini et al., 2019). Asas akuntabel atau akuntabilitas perlu untuk diperhatikan oleh aparatur desa sebagai pihak pengelola dana desa (DD) dikarenakan hal ini berkaitan dengan tanggungjawab pemdes terhadap publik. Akuntabilitas merupakan bentuk mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak lain (Indraswari & Rahayu, 2021). Dengan demikian, akuntabilitas bermakna penting sebagai prinsip tata kelola pemerintahan guna meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap program kerja pemerintah (Aziiz & Prastiti, 2019). Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kasus penyelewengan dana desa hingga saat ini, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada mantan Kepala Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan, divonis 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp 635 juta (Pramono, 2022). Menurut Kacabjari Pompanua Handoko, terdakwa terbukti melakukan korupsi yaitu pekerjaan fisik dalam APBDes tahun 2017 yang dikerjakan tidak sesuai RAB dan belum dapat dipertanggungjawabkan serta terdakwa yang tidak menyetorkan pajak ke negara dan tidak dapat mempertanggungjawabkan kwitansi penggunaan anggaran desa. Terjadinya kasus penyelewengan dana desa tersebut harus dengan tegas dicegah oleh Pemerintah agar tidak terus merugikan daerah dan masyarakat. Menurut Eprilsa & Budiwitjacksono (2022), pencegahan terjadinya kecurangan oleh pemerintah dilakukan dengan menyediakan sistem informasi akuntansi yang khusus untuk membantu mengelola keuangan desa yaitu sistem keuangan desa atau biasa disebut SISKEUDES.

Aplikasi SISKEUDES menciptakan peningkatan kualitas desa yang baik, pelaporan keuangan yang tepat sesuai prosedur, serta proses pelaporan pertanggungjawaban yang mudah (Juardi et al., 2018). Banyaknya manfaat dari SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa membuat semakin besarnya urgensi

penerapan aplikasi SISKEUDES untuk digunakan di setiap desa. Hasil penelitian yang dilakukan Arfiansyah (2020) mengungkapkan bahwasanya penerapan aplikasi siskeudes mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Disisi lain dalam mengelola keuangan atau dana desa, suatu sistem yaitu sistem pengendalian intern diperlukan untuk mencapai pengelolaan dana desa (DD) yang akuntabel (Martini et al., 2019). Hal ini dikarenakan menurut Arfiansyah (2020) sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan memberikan kepastian yang cukup bagi proses pelaksanaan pemerintah desa (Pemdes) dalam mengelola dana desa (DD), sehingga adanya sistem pengendalian internal dapat mengendalikan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemdes agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Arfiansyah (2020) mengungkapkan SPIP mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun bertolakbelakang dengan penelitian Santoso *et al* (2022).

Faktor lain yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab atau mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah kompetensi SDM atau aparatur desa. Aspek kompetensi merupakan salah satu hal yang harus dimiliki aparatur pengelola dana desa agar akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik (Fajri *et al.*, 2021). Hal ini karena sumber daya manusia yang berkompeten diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan atau dana desa yang akuntabel sehingga tujuan organisasi dapat terpenuhi (Ilhami & Widhiastuti, 2022). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kecakapan seseorang menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Maka dari itu, adanya kompetensi SDM diperlukan agar memudahkan pengelolaan dana desa dalam mencapai tujuan pemerintah. Hasil penelitian Pahlawan *et al* (2020) mengungkap bahwasanya kompetensi SDM mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, akan tetapi hal tersebut tidak sependapat dengan Sundanah *et al* (2023) yang mengatakan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan penggunaan siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta diharapkan dapat menambah referensi serta dapat memberikan informasi lebih lanjut dan masukan bagi pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa manajemen mementingkan sasaran hasil untuk kepentingan organisasi bukan tujuan dari masing-masing individu (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini mengemukakan bahwasanya keberhasilan organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas yang efektif serta efisien sehingga dapat memberikan kepuasan *stakeholder* dan pengelola organisasi (Jefri, 2018). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kepuasan dan kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang erat dalam teori *stewardship* (Donaldson & Davis, 1991). Pemerintah desa selaku *steward* yang dipercaya oleh masyarakat selaku pemilik (*principal*) harus memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi tercapai.

Good Governance

Good governance memiliki makna kegiatan pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku dengan masyarakat sebagai pemilik kekuasaan guna mewujudkan cita-cita bangsa (R. C. Dewi & Suparno, 2022). Oleh sebab itu, tata pemerintahan bersih dan akuntabel penting untuk dilaksanakan supaya pemerintahan yang baik dapat tercipta (Astuti *et al.*, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwasanya *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang dalam penyelenggaraannya diperlukan prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi yaitu salah satunya akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel mengharuskan para pegawainya agar dapat melaksanakan tupoksi sesuai kewenangan yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan.

Dana Desa

Keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan demikian dapat juga dikatakan setiap hak atau kewajiban atas semua hal terkait pelaksanaan desa baik yang dapat dinilai dan berupa uang ataupun barang adalah definisi dari keuangan desa. Pemdes dalam mengelola keuangan atau dana desa (DD) harus dilaksanakan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan pembangunan desa yang maju, sehingga dana desa harus digunakan secara terarah, efisien, dan terkendali.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pemenuhan pertanggungjawaban atas penyerahan tanggungjawab yang telah diberikan (Masruroh *et al.*, 2022). Sehingga, adanya akuntabilitas membuat aparatur yang memiliki tugas dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana desa harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat digunakan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi berarti perilaku seseorang saat menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga memperoleh hasil yang maksimal (Ramadhania & Novianty, 2020). Menurut Ayem & Fitriyaningsih (2022) agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal kompetensi menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh pengelola dana desa (DD).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Aziiz & Prastiti (2019) organisasi dapat diarahkan, diawasi, dan diukur sumber dayanya dengan melakukan suatu pengendalian internal. Standar yang digunakan dalam pengendalian pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan dilakukan sesuai pedoman SPIP. Adanya sistem pengendalian intern pemerintah dipergunakan sebagai alat dalam mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan guna mencapai aktivitas pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan tertib terhadap peraturan yang berlaku.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Menurut Aeni *et al* (2022) sistem keuangan desa merupakan alat pengendalian kegiatan keuangan dan penatausahaan pemerintah desa dalam bentuk sistem informasi akuntansi yang bertujuan mempermudah pembuatan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas dana desa. Sehingga dengan adanya siskeudes ini dapat membawa perubahan positif dalam proses pelaporan keuangan secara bertanggung jawab.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Fajri *et al* (2021) pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel jika sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang baik, sehingga prosedur dalam mengelola dana desa (DD) dapat dipahami dan diterapkan secara optimal. Sesuai dengan penjelasan dalam teori *stewardship* bahwa keberhasilan organisasi dapat dicapai melalui kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, pemerintah desa

selaku *steward* memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*principal*) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Uraian ini didukung penelitian Ayem & Fitriyaningsih, (2022), Umaira & Adnan (2019), Susanti *et al* (2022), Pahlawan *et al* (2020) yang menyatakan bahwasanya kompetensi SDM mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh SPIP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Arfiansyah (2020) pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif dapat terwujud apabila terdapat suatu sistem yang memadai mengenai pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan pengelolaan keuangan terhadap ketentuan yang berlaku. Adanya sistem tersebut dapat mengontrol seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa sehingga dapat sesuai dengan tujuan pembangunan desa serta tertib terhadap aturan yang berlaku. Dalam teori *stewardship* dikatakan bahwa masyarakat (*principal*) memberikan kepercayaan terhadap pemerintah desa (*steward*) untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mencapai kesuksesan organisasi. Maka dari itu, pemerintah desa selaku *steward* harus menciptakan lingkup penyelenggaraan kegiatan yang taat terhadap peraturan melalui pengendalian internal sehingga kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan kepuasan terhadap masyarakat ataupun pengelola organisasi. Uraian tersebut didukung oleh penelitian Arfiansyah (2020), (P. A. D. R. Dewi & Julianto, 2020), Aziiz & Prastiti (2019), dan Muallifu *et al* (2019).

H₂: SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Penggunaan SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Ayem & Fitriyaningsih (2022) pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu dari perencanaan hingga pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel melalui penggunaan sistem keuangan desa. Seperti halnya dalam teori *stewardship* yang mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien, sehingga penggunaan siskeudes ini berperan dalam mencapai tujuan organisasi dan memudahkan pengelola organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Fitur yang tersedia dalam sistem tersebut dibuat sederhana sehingga

pengimplementasian siskeudes dapat dilakukan dengan mudah oleh pengguna. Penggunaan sistem keuangan desa mendukung aparatur desa agar dana desa dapat dikelola dengan mudah serta pelaporan keuangan yang terintegrasi sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa keberadaan SISKEUDES sangat berpengaruh agar hasil yang didapat menjadi lebih optimal. Pernyataan tersebut sependapat oleh penelitian Natania Mega *et al* (2022), Ayem & Fitriyaningsih (2022), Arfiansyah (2020), dan P. A. D. R. Dewi & Julianto, (2020).

H₃: Penggunaan SISKEUDES berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, dimana sumber data berasal dari aparatur pengelola dana desa. Penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan atau pernyataan kepada responden dilakukan sebagai teknik dari pengumpulan data. Variabel independen (X) yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu kompetensi SDM (X1), SPIP (X2), dan penggunaan siskeudes (X3). Sedangkan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa digunakan sebagai variabel dependen atau terikat (Y), dimana semua variabel diukur dengan skala likert yang terdiri 5 poin. Adapun populasi penelitian ini adalah aparatur pengelola dana desa dari 15 desa di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sejumlah 60 aparatur desa. Penentuan sampel penelitian dilakukan menggunakan rumus slovin, yang mana didapati sampel sejumlah 38 aparatur serta teknik *simple random sampling* digunakan untuk penarikan sampel. Penggunaan SEM PLS dilakukan pada penelitian ini untuk menganalisis atau mengkaji data penelitian serta menguji hipotesis yang dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Uji Model Pengukuran dan Struktural

Pengujian model pengukuran dilakukan pada tahap awal PLS, uji pertama yang perlu dilakukan yaitu validitas konvergen dengan melihat besaran *outer loading* yang

memenuhi kriteria dengan batas ukur 0,7. Hasil dari *loading factor* sebagai berikut: (Gambar 1). Berdasarkan gambar tersebut diketahui nilai dari *outer loading* telah memenuhi nilai batas minimum *convergent validity* atau dengan demikian hasil uji *outer loading* bisa dikatakan valid. Kedua yaitu uji validitas diskriminan, adapun indikator yang digunakan adalah nilai *cross loading* >0,7 hal ini digunakan untuk mengetahui semua konstruk dalam model telah memenuhi kriteria. Adapun, cara lain yang dapat dilakukan menggunakan kriteria Fornell-Larcker, dengan indikator nilai dari akar AVE. Standar yang digunakan yaitu nilai pada setiap variabel harus lebih tinggi dari nilai terhadap variabel lain. Hasil uji validitas diskriminan diperoleh sebagai berikut: (Tabel 1) dimana diketahui bahwa hasil uji telah sesuai dengan standar kriteria yang digunakan. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan melalui nilai *composite reliability* dan *Cronbach alpha*. Perolehan uji reliabilitas dapat diketahui yaitu: (Tabel 2). Berdasarkan tabel diketahui nilai kedua indikator pada semua variabel telah memenuhi untuk dikatakan reliabel yaitu diatas 0,7 beserta nilai AVE >0,5

Pengujian selanjutnya dilakukan uji inner model yang memperlihatkan besaran dari nilai *R-Square*. Hasil uji *R-Square* disajikan dalam (Tabel 3), dimana dari hasil uji *R-Square* yang tertera pada (Tabel 3) memperoleh nilai variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,256. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi SDM (X1), SPIP (X2), dan Penggunaan Siskeudes (X3) dalam penelitian ini sebesar 25,6%, adapun sisa 74,4% dapat diterangkan oleh variabel lain yang tidak diusulkan pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis *bootstrapping* dengan melihat *path coefficient* dan nilai *t-statistic* pada (Tabel 4). Suatu model dinyatakan layak atau hipotesis diterima jika nilai $T > 1,96$ dan $p < 0,05$. Berdasarkan pengujian pada tabel 4 tersebut diperoleh hasil yaitu hipotesis satu (H_1) yang menyatakan kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**. Nilai dari hasil uji memperlihatkan *T-statistic* sebesar 0,015 dan *P-values* 0,988 artinya kompetensi SDM tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan teknis terkait akuntansi dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga mengakibatkan penyusunan laporan keuangan maupun tugas kurang optimal. Maka dari itu, pelatihan teknis yang tepat penting untuk dilakukan agar dapat

menunjang pelaksanaan kerja organisasi. Sependapat oleh Sundanah *et al* (2023) yang mengungkapkan bahwasanya kompetensi SDM tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya hipotesis dua (H_2) yang menyatakan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**. Berdasarkan uji tersebut menunjukkan nilai *T-statistic* sebesar 0,053 dan P-values 0,615 dimana dapat diartikan bahwa SPIP tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. SPIP yang masih belum optimalnya SPIP menyebabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi kurang optimal pula. Belum optimalnya SPIP disebabkan karena aparatur desa yang belum memperhatikan beberapa unsur dari SPIP yang harus diwujudkan, seperti struktur organisasi yang belum terbentuk sesuai kebutuhan serta penyampaian informasi yang belum efektif sehingga menimbulkan risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan pemerintah. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan Santoso *et al* (2022) yang mengungkapkan bahwasanya SPIP tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD). Kemudian hipotesis tiga (H_3) yang menyatakan penggunaan siskeudes berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **diterima**. Perolehan uji dalam tabel memperlihatkan nilai *T-statistic* sebesar 2,706 serta P-values 0,007 dimana dapat diartikan bahwasanya siskeudes mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut membuktikan adanya siskeudes dapat membantu aparat pengelola dana desa untuk membuat pelaporan keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud. Sebagaimana pada teori *stewardship* yang mengatakan bahwasanya organisasi mengutamakan hasil untuk kepentingan organisasi bukan individu, sehingga adanya siskeudes ditujukan untuk kepentingan organisasi guna mencapai hasil yang maksimal. Hasil ini sependapat dengan Arfiansyah (2020) yang mengungkapkan bahwa siskeudes mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan kompetensi SDM sebagai variabel X1 dan SPIP (X2) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adapun penggunaan sistem keuangan desa (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini, untuk peneliti selanjutnya harap mempertimbangkan variabel lain misal penyajian laporan keuangan

dan komitmen organisasi atau menambah variabel pemoderasi. Sedangkan bagi aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, seperti pengetahuan teknis dan keterampilan pemanfaatan teknologi informasi melalui pelatihan guna meningkatkan kualitas kerja dan memperhatikan kembali unsur-unsur sistem pengendalian intern yang belum dilaksanakan secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, H., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*, 7(2), 67–82. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jaku/article/download/18494/14268>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296>
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian Journal of Management*, 16(June 1991), 49–66. <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- Eprilsa, S. D., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6, 748–757. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/download/4216/2732>
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209–227. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/download/14463/7193>
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat

- Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 185–198. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/2302>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3866/3877>
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28. <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/162/166>
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Amalia Putri, R. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV(1), 84–107. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/download/5159/4627>
- Kementrian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses pada 5 Desember melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Masruroh, I. M., Muchsin, S., & Suyeno. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu). *Jurnal Respon Publik*, 16(2), 53–60. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2970894&val=26511&title=AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus di Desa Pesanggrahan Kota Wisata Batu>
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business, and Engeneering*, 1(1), 49–59. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/download/875/454>
- Natania Mega, K., Kalangi, L., Kapojos, P. M., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 150–161. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/43517/38167>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pramono, A. (2022). *Eks Kades di Bone Korupsi Dana Desa Rp 635 Juta Divonis 4 Tahun Bui*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6472325/eks-kades-di-bone-korupsi-dana-desa-rp-635-juta-divonis-4-tahun-bui>
- Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia

terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 807–813. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/download/2125/1668>

Santoso, L., Suprihati, S., & Ningsih, S. (2022). The Effect of Village Apparatus Competence, Internal Control System, and Organizational Commitments on Village Fund Management Accountability (Case Research in Banyudono District). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1233–1243. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6236>

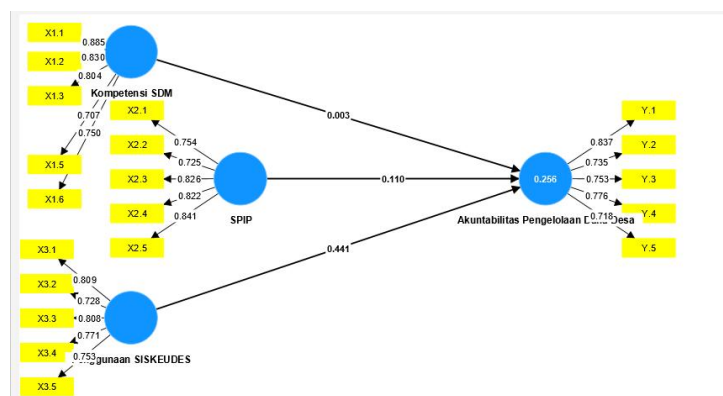
Sundanah, Pravasanti, Y. A., & Pardanawati, S. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(1), 222–236. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1571>

Susanti, Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan Desa dan Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 254–277. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/download/4688/2263>

Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>

Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Hasil *outer loading*

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas Diskriminan

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi SDM	Penggunaan SISKEUDES	SPiP
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.765			
Kompetensi SDM	0.291	0.797		

Penggunaan SISKEUDES	0.496	0.492	0.775	
SPIP	0.328	0.641	0.489	0.795

Tabel 2. Hasil Pengujian Composite Reliability

Variabel	Composite reliability (rho_a)	Cronbach's alpha	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.882	0.827	0.585
Kompetensi SDM	0.927	0.863	0.636
Penggunaan SISKEUDES	0.847	0.835	0.6
SPIP	0.886	0.858	0.632

Tabel 3. Hasil Pengujian R-Square

	R-square
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.256

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Path Coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 ->Y	0.003	0.034	0.187	0.015	0.988
X3 -> Y	0.441	0.455	0.163	2.706	0.007
X2-> Y	0.11	0.133	0.219	0.503	0.615